



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 54) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 54
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

<i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i>	1
---	---

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

<i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i>	2
---	---

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	4
--	---

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	6

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

- Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
 32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	8
---	---

- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	9
--	---

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	11
---	----

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi Target
								Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9) (Bulan Juni)	11=(10/4) (Bulan Juni)
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	90%	87%	100%		0%	100%	24.17	26.86
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan	90%	90%	100%	90%	90.0%	90%	0	0
Sub Kegiatan Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan/ Dokumen	2	2	2	100	2 Laporan/ Dokumen	0	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	90%		100%			90%	41,7	46.3
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	52	12 bulan	12	100	73 Orang/Bulan	73/6 bulan	0.42

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90%		90%			90%	50	55.6
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1	7 orang	7	100	1 Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	0	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90%		100%			90%	25	27.8
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	12 bulan	12	100	1 Paket	0	0

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	5	12 bulan	12	100	1 Paket	0	0
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	4	12 bulan	12	100	2 Paket	1	50
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1	2 jenis	2	100	1 Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1	12 bulan	12	100	1 Laporan	0	0
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	1	12 bulan	12	100	1 Laporan	0	0
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Layanan Adminduk.	90%		100%			90%	31,6	35.1
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 Unit	1	1 Unit	1	100	6 Unit	6	100
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13 Unit	1	3 Jenis	3	100	13 Unit	0	0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90%		100%			90%	0	0
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1	12 bulan	12	100	1 Laporan	0	0
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1	5 orang	5	100	1 Laporan	0	0

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90%		100			90%	4,08	4.53
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	42 Unit	8	8 Unit	8	100	42 Unit	1	2.38
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinnya	6 Unit	8	8 Unit	8	100	6 Unit	1	16.67

Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1	20	18		1 Unit	0	0
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90%		100%			90%	34,8	38.67
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Kartu Identitas Kependudukan	90%		95%			90%	34,8	38.67
Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	100	1 laporan	1	100	1 Dokumen	0	0
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	36000 Dokumen	100	24.000 Dokumen	23658	98.6	36000 Dokumen	12,578	0.035

Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA, KK dan KTP el	12 Laporan	100	475000	421014	88.6	12 Laporan	5 Laporan	4.17
Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90%		100			90%	34,02	37.8
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	90%		100			90%	34,02	37.8
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.050 Dokumen	97,72	98.050 Dokumen	109607	111.8	100.050 Dokumen	33,701	0.034

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan dan pengolahan database kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100%		90%			100%		0
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100%		90%			100%	22,22	22.22
Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2 Dokumen	1 Dokumn	90%	89.71	99.68	2 Dokumen	0	0
Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	4 Laporan	1 OPD	4 Laporan	3 Opd	75	4 Laporan	1	25%

Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	73,56	17 jenis	17	100	3 Laporan	1	33.3
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD	100%					100%	0	0
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	3 Buah	3	3	100%	1 Dokumen	0	0
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	Leaplet 6500 Lembar	Spanduk 3 M, Leaplet 4888	Leaplet 3500 Lembar	71.60	1 Laporan	0	0
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		90%		100%			90%	0	0

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	80 orang	40 orang Operator SIAK	40 orang	100	1 Laporan	0	0
---	---	-----------	----------	------------------------	----------	-----	-----------	---	---

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran RENJA Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023**

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	12,002,475,397	4,485,161,454	37.37
1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	50,580,000	-	0.00
1	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	2 Dok.	50,580,000	-	0.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	6,692,065,956	3,486,472,926	52.10
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	73 Org/Bln	6,692,065,956	3,486,472,926	52.10
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90%	373,493,841	63,045,000	16.88
1	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	1 Dok.	257,903,841	63,045,000	24.45
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	115,590,000	-	0.00
4	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	90%	680,492,015	288,081,430	42.33
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	43,183,800	42,485,250	98.38
2	Penyediaan Peralatan &Perlengkapan Kantor	1 Paket	291,234,200	34,936,150	12.00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan	2 Paket	124,000,300	41,988,950	33.86

	Penggandaan				
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dok	9,975,600	3,830,000	38.39
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	48,420,500	18,354,600	37.91
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	110,054,915	107,676,480	97.84
7	Penataan Arsip Dinamis	1 Dok	53,622,700	38,810,000	72.38
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	3,673,291,000	451,750,000	12.30
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	509,976,000	451,750,000	88.58
2	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	13 Unit	3,163,315,000	-	0.00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	90%	413,612,585	141,768,398	34.28
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	206,405,835	88,638,398	42.94
2	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	1 Laporan	207,206,750	53,130,000	25.64
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	90%	118,940,000	54,043,700	45.44
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	42 Unit	19,400,000	7,923,100	40.84
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	53,360,000	20,752,100	38.89
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 Unit	46,180,000	25,368,500	54.93
II	PROGRAMPENDAFTARAN PENDUDUK	90%	5,769,944,986	4,898,399,719	84.90
1	PelayananPendaftar n Penduduk	90%	5,769,944,986	4,898,399,719	84.90
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dok	22,782,250	10,497,500	46.08
2	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran	36.000 Dok	43,383,600	15,218,000	35.08

	Penduduk				
3	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Dok.	5,703,779,136	4,872,684,219	85.43
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	90%	406,655,200	284,305,800	69.91
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	90%	406,655,200	284,305,800	69.91
1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100,050 Dok.	406,655,200	284,305,800	69.91
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100%	8,865,713,900	7,310,220,074	82.45
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	100%	8,728,170,800	7,289,395,274	83.52
1	Pengolahan dan Penyajian database Kependudukan	2 Dok.	170,011,100	89,036,900	52.37
2	Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan	4 Laporan	35,073,800	8,512,730	24.27
3	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	8,523,085,900	7,191,845,644	84.38
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	93,517,400	4,912,100	5.25
1	Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan	1 Dok	30,244,800	3,788,100	12.52
2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	63,272,600	1,124,000	1.78
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40 Operator	44,025,700	15,912,700	36.14
1	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	44,025,700	15,912,700	36.14
	JUMLAH		27,044,789,483	16,978,087,047	62.78

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 62,78%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 62,78% untuk target anggaran, dan 24,17% untuk target kinerja. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan yakni bahwa ada beberapa sub kegiatan yang belum melaporkan hasil kinerja sub kegiatan yakni yang berupa laporan sub kegiatan yang dapat direalisasi pada akhir tahun, seperti lapoan pelaksanaan pembayaran rekening listrik, air, telepon, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi, pelaporan rentan adminuk, dll. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.3
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
		Kinerja (%)	% Realisasi Anggaran
1	2	3	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.17	37.37
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00	0.00
01.01.01	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	0.00	0.00

01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.30	52.10
01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	0.42	52.10
01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.56	16.88
01.03.01	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	1.00	24.45
01.03.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	0.00	0.00
01.04	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	27.78	42.33
01.04.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.00	98.38
01.04.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	12.00
01.04.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.50	33.86
01.04.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.00	38.39
01.04.05	Fasilitas Kunjungan Tamu	0.00	37.91
01.04.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	97.84
01.04.07	Penataan Arsip Dinamis	0.00	72.38
01.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.09	12.30
01.05.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.00	88.58
01.05.02	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	0.00	0.00
01.06	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	0.00	34.28
01.06.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	42.94
01.06.02	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	0.00	25.64
01.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	4.54	45.44
01.07.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	0.19	40.84

01.07.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.67	38.89
01.07.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	0.00	54.93
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0.00	84.90
02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	38.70	84.90
02.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0.00	46.08
02.01.02	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	0.63	35.08
02.01.03	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0.50	85.43
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	37.80	69.91
03.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	37.80	69.91
03.01.01	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	52.59	69.91
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	94.00	82.45
04.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	22.22	83.52
	Pengolahan dan Penyajian database Kependudukan	0.50	52.37
	Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan	0.25	24.27
	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	0.33	84.38
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0.00	5.25
	Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan	0.00	12.52
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	0.00	1.78

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0.00	36.14
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0.00	36.14
	JUMLAH	24,17	62.78

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)				
								I		II		III		IV												
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									K	Rp. (000)	K
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100				
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																										
Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																										
Program Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan	90	%	16,655,	86.3	12,41	90	12,00	14.65	1,758,	23	2,72					37.37	4,48	42	37.368	63693	124	4,497	137.	2700	3.637

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan			436		2,144		2,475,397		508,726		6,652,728						5,161,454				,573,598	37	72
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	90	%	130,000,000	99.7	98,311,000	90	50,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00000000	100	98,311,000	110.81	75.62384615	
Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	90	%	6,200,000,000	93.5	6,424,995,509	90	6,692,065,956	18.58	1,243,285,499	34	2,243,187,427				52.10	3,486,472,926	58	52.09860376	146	9,911,468,435	161.76	159.8623941	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90	%	260,000	88.7	273,454,380	90	373,493,841	-	-	17	63,045,000				16.88	63,045,000	19	16.87979642	106	336,499,380	117	129422.8385	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90	%	8,384,000	99.0	4,485,110,301	90	680,492,015	22.45	152,751,580	20	135,329,850				42.33	288,081,430	47	42.33428514	141	4,773,191,731	157	56932.15328	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase sarana dan prasarana aparatur	90	%	550,000	95.0	497,585,425	90	3,673,291,000	7.90	290,250,000	4	161,500,000				12.30	451,750,000	14	12.2982361	107	949,335,425	119	172606.4409	

Pemerintah Daerah	berkondisi baik																						
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90	%	847,636	92.0	435,783,434	90	413,612,585	9.93	41,087,447	24	100,680,951				34.28	141,768,398	38	34.27564904	126	577,551,832	140	68136.77475
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90	%	283,800	94.0	196,911,253	90	118,940,000	26.18	31,134,200	19	22,909,500				45.44	54,043,700	50	45.43778376	139	250,954,953	155	88426.69239
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, KIA, SKP/D WNI/WNA dan Pendataan Rentan Admuduk)	90	%	1,028,933	95.1	1,004,115,839	90	5,769,944,986	72	4,150,560,419	13	747,839,300				84.90	4,898,399,719	94	84.89508532	180	5,902,515,558	200	573654.0239
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk	90	%	1,028,933	95.1	1,004,115,839	90	5,769,944,986	71.93	4,150,560,419	13	747,839,300				84.90	4,898,399,719	94	84.89508532	180	5,902,515,558	200	573654.0239
Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan dokumen atas	90	%	237,535,100	99.2	149,406,774	90	406,655,200	58.15	236,467,000	12	47,838,800				69.91	284,305,800	77.67778	69.91323362	169	433,712,574	188	182.5888359

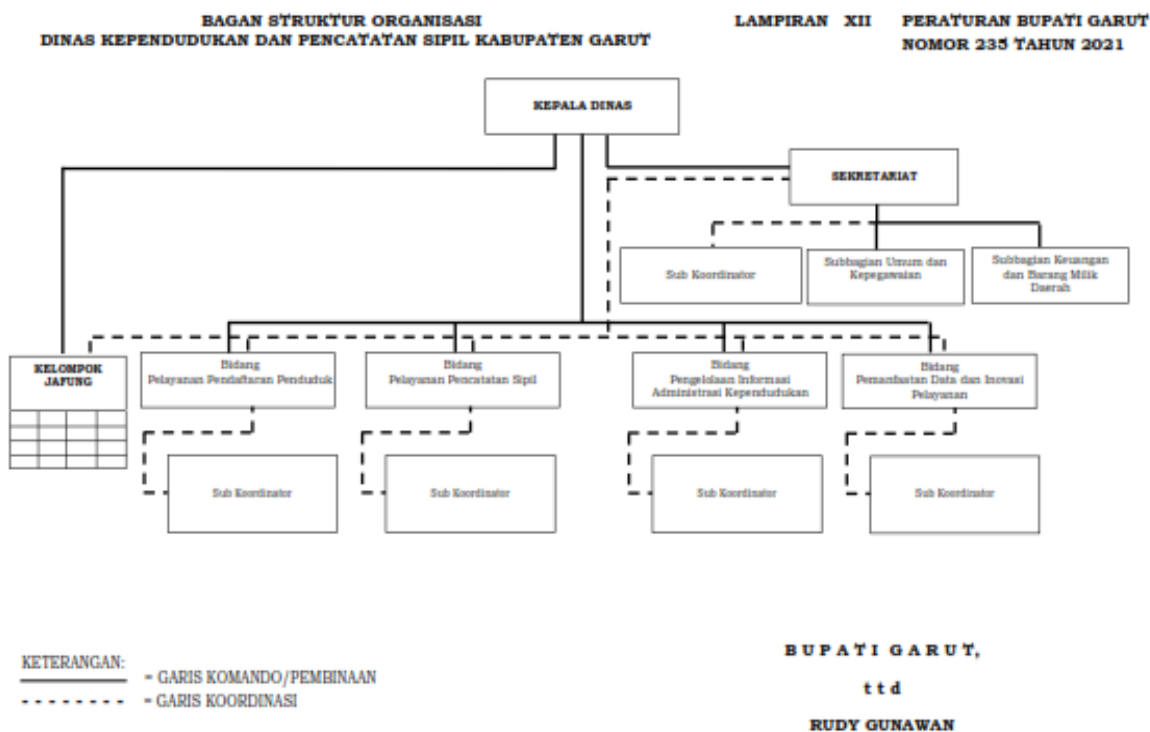
	pelaporan peristiwa penting																						
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen akta pencatatan sipil	90	%	237,535,100	99.2	149,406,774	90	406,655,200	58.15	236,467,000	12	47,838,800				69.91	284,305,800	78	69.91323362	169	433,712,574	188	182.5888359
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90	%	237,535,100	80.6	926,554	100	8,865,713,900	81.41	7,217,473,250						81.41	7,310,220,074	81.40882	124.912448	161.9888	7311146628	179.98758	3077.922643
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Akurasi database kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	90	%	369,049	79.0	845,488,572	100	8,728,170,800	82.57	7,206,698,550	1	82,696,724				83.52	7,289,395,274	84	83.51572673	163	8,134,883,846	181	2204282.858
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan penyampaian kebijakan adminduk.	90	%	234,740	84.0	96,196,896	90	93,517,400	2.52	2,354,000	3	2,558,100				5.25	4,912,100.000	6	5.252605397	89	101,108,996	99	43072.75965
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Tenaga SIAK terlatih	40	%	96,797	98.4	49,196	90	44,025,700	19.13	8,420,700	17	7,492,000				36.14	15,912,700.000	40	36.14411582	135	15,961,896	336.46	16490.07304

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2. 1 Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sumber: Perbup 231 Tahun 2021

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut disebutkan bahwa uraian tugas dan fungsi kepala perangkat daerah dan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
2. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional;
3. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
4. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
5. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan, barang milik daerah dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga Dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	38
--	----

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi urusan manajemen identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk serta fasilitasi dan supervisi kegiatan yang berhubungan dengan bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi urusan manajemen identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
2. penyelenggaraan rencana Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi urusan manajemen identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pencatatan Sipil, meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
2. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
5. penyelenggaraan pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
6. penyelenggaraan pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; dan
7. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data serta tata kelola sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data dan tata kelola sumber daya manusia, teknologi, informasi dan komunikasi;
2. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data dan tata kelola sumber daya manusia, teknologi, informasi dan komunikasi;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, meliputi kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, inovasi pelayanan. Dalam menyelenggarakan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	40
---	----

tugas tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
5. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
6. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
7. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

<i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i>	41

Tabel 2. 5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

No	Indikator (IKK Ouput)	SPM/Standar Nasional	IKK (IKK Outcome)	Target				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 20201 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	1. Penerbitan Akta Perkawinan 2. Penerbitan Akta Perceraian	-----	Perekaman KTP elektronik	100	100	100	100	107,85 %	99 %	99 %	99%	
	3. Penerbitan Akta Kematian 4. Penyajian Data Kependudukan		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	62.000	65.000	851.263	936.389	19 %	21 %	18 %	18%	
			Kepemilikan Akta Kelahiran	95.000	95.000	100.050	100.050	95 %	100 %	100 %	100 %	

			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	4	4	4	4	0	3	3	4	
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam manajemen pelayanan publik tingkat kualitas pelayanan masih belum dapat memenuhi keinginan masyarakat, antara lain :

- a. pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan;
- b. belum meratanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,
- c. masih lemahnya SDM pelayanan publik baik dari segi kapasitas dan sikap perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada aspek SDM Aparatur, masih menghadapi permasalahan manajemen kepegawaian meliputi :

- a. komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, hal ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan;
- b. tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah;
- c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja.

Bahwa sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menghadapi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, diantaranya :

- a. personil masih sangat terbatas yang tidak seimbang antara pengguna layanan dengan petugas yang melayani.

Selain permasalahan dan hambatan tersebut disampaikan pula tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya :

- a. jumlah penduduk yang dilayani;
- b. letak geografis, luas wilayah, jangkauan pelayanan dan faktor lain baik eksternal maupun internal

Selain itu kami juga inventarisir peluang untuk meningkatkan pelayanan yaitu :

- a. perhatian pimpinan daerah atas penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat baik;
- b. dukungan lembaga legislatif (DPRD) cukup tinggi,
- c. kesadaran masyarakat akan dokumen kependudukan cukup tinggi;
- d. tingginya penggunaan data/dokumen kependudukan oleh lembaga/instansi formal maupun non formal.

<i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i>	44
---	----

Untuk hal tersebut kiranya tidak berlebihan apabila dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024, dapat menjawab masalah, kendala dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan dan juga penyelenggaraan tugas serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan melalui penyediaan dan peningkatan sarana parasarana serta pemenuhan personil baik kualitas maupun kuantitas.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja. Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 telah sesuai
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 4 program, yaitu:

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	45
---	----

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pendaftaran Penduduk
 - c. Program Pencatatan Sipil
 - d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 28 sub kegiatan;
 4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.853.746.937,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.853.746.937,-
 5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Plafond Anggaran (RP)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					27,853,746,937.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					27,853,746,937.00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	12,811,432,851	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	12,811,432,851		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	50,580,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	50,580,000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,580,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,580,000		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kesediaan Waktu pembayaran Gaji dan Tunjangan ASn Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	90 % 100 Persen	7,501,023,410	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kesediaan Waktu pembayaran Gaji dan Tunjangan ASn Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	90 % 100 Persen	7,501,023,410
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang / Bulan	7,501,023,410	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang / Bulan	7,501,023,410
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	90 %	373,493,841	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	90 %	373,493,841
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	257,903,841	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	257,903,841
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	115,590,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	115,590,000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Terpenuhinya Peralatan dan perelengkapan kantor	12 bulan	680,492,015	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Terpenuhinya Peralatan dan perelengkapan kantor	12 bulan	680,492,015
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43,183,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43,183,800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	291,234,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	291,234,200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	124,000,300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	124,000,300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9,975,600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9,975,600

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	48,420,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	48,420,500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	110,054,915	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	110,054,915
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	53,622,700	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	53,622,700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	90 Persen	3,673,291,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	90 Persen	3,673,291,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	509,976,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	509,976,000

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	3,163,315,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	3,163,315,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen yang dikirim		413,612,585	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen yang dikirim		413,612,585
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	206,405,835	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	206,405,835
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207,206,750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207,206,750
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak.		118,940,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak.		118,940,000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	19,400,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	19,400,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53,360,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53,360,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	46,180,000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	46,180,000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90 %	5,769,944,986	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90 %	5,769,944,986

	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen identitas penduduk	90 %	5,769,944,986	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen identitas penduduk	90 %	5,769,944,986
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	22,782,250	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	22,782,250
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	36000 Dokumen	43,383,600	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	36000 Dokumen	43,383,600
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Dokumen	5,703,779,136	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Dokumen	5,703,779,136
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90 %	406,655,200	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90 %	406,655,200

	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Jumlah Penerbitan Akta Kematian Jumlah penerbitan Akta Perkawinan	95000 Akta 4000 Akta 50 Akta	406,655,200	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Jumlah Penerbitan Akta Kematian Jumlah penerbitan Akta Perkawinan	95000 Akta 4000 Akta 50 Akta	406,655,200
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100050 dokumen	406,655,200	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100050 dokumen	406,655,200
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100 %	8,865,713,900	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100 %	8,865,713,900
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase akurasi database dan pemanfaatan data kependudukan	100 %	8,728,170,800	Pengumpulan Data dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase akurasi database dan pemanfaatan data kependudukan	100 %	8,728,170,800

	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	170,011,100	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	170,011,100
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Laporan	35,073,800	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Laporan	35,073,800
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	8,523,085,900	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	8,523,085,900
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Alat Pembaca KTP-el Tesampaikannya Informasi dan Edukasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		93,517,400	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Alat Pembaca KTP-el Tesampaikannya Informasi dan Edukasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		93,517,400

	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	30,244,800	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	30,244,800
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	63,272,600	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	63,272,600
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	40 Operator	44,025,700	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	40 Operator	44,025,700
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	44,025,700	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	44,025,700
	JUMLAH				27,853,746,937	JUMLAH				27,853,746,937

Tabel 2. 7

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Rancangan Perubahan RKPD								Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Semula	Menjadi		Renja 2023 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					24,385,987,082	27,044,789,483	27,853,746,937	2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					27,853,746,937	
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	90 %	17,754,322,632	12,002,475,397	12,811,432,851	2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	90 %	12,811,432,851	
2 12 01 2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	90 %	90 %	103,486,000	50,580,000	50,580,000	2 12 01 2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	90 %	90 %	50,580,000	

2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	103,486,000	50,580,000	50,580,000	2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50,580,000	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan.	90 %	90 %	6,907,089,541	6,692,065,956	7,501,023,410	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan.	90 %	90 %	7,501,023,410	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	59 Orang/bulan	6,907,089,541	6,692,065,956	7,501,023,410	2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	59 Orang/bulan	7,501,023,410	
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	90 %	90 %	304,311,841	373,493,841	373,493,841	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	90 %	90 %	373,493,841	
2	12	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	257,903,841	257,903,841	257,903,841	2	12	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	257,903,841	
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	46,408,000	115,590,000	115,590,000	2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	115,590,000	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan	90 %	90 %	7,740,374,000	680,492,015	680,492,015	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan	90 %	90 %	680,492,015	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	48,418,200	43,183,800	43,183,800	2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43,183,800	

2	12	01	2.02	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,338,788,800	291,234,200	291,234,200	2	12	01	2.02	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	291,234,200	
2	12	01	2.05	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	570,107,300	124,000,300	124,000,300	2	12	01	2.05	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	124,000,300	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,975,600	9,975,600	9,975,600	2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,975,600	
2	12	01	2.08	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	262,693,400	48,420,500	48,420,500	2	12	01	2.08	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	48,420,500	
2	12	01	2.09	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	456,768,000	110,054,915	110,054,915	2	12	01	2.09	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	110,054,915	
2	12	01	2.10	06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	53,622,700	53,622,700	53,622,700	2	12	01	2.10	06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	53,622,700	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan	90 %	90 %	1,681,708,700	3,673,291,000	3,673,291,000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan	90 %	90 %	3,673,291,000	

2	12	01	2.	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	6 Unit	529,993,700	509,976,000	509,976,000	2	12	01	2.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	6 Unit	509,976,000		
2	12	01	2.	05	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0	171,880,000	-	-	2	12	01	2.0	05	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0	-		
2	12	01	2.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	979,835,000	3,163,315,000	3,163,315,000	2	12	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3,163,315,000		
2	12	01	2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90 %	90 %	729,682,550	413,612,585	413,612,585	2	12	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90 %	90 %	413,612,585		
2	12	01	2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	344,169,000	-	-	2	12	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	-		
2	12	01	2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	205,606,800	206,405,835	206,405,835	2	12	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	206,405,835		
2	12	01	2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	179,906,750	207,206,750	207,206,750	2	12	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	207,206,750		

2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan	90 %	90 %	287,670,000	118,940,000	118,940,000	2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan	90 %	90 %	118,940,000	
2	12	01	2.0109	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	12 Unit	19,400,000	19,400,000	19,400,000	2	12	01	2.0109	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	12 Unit	19,400,000	
2	12	01	2.0209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	121,740,000	53,360,000	53,360,000	2	12	01	2.0209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	53,360,000	
2	12	01	2.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,350,000	-	-	2	12	01	2.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	
2	12	01	2.1009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	46,180,000	46,180,000	46,180,000	2	12	01	2.1009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	46,180,000	
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penerbitan dokumen peristiwa kependudukan	90 %	90 %	1,451,677,000	5,769,944,986	5,769,944,986	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penerbitan dokumen peristiwa kependudukan	90 %	90 %	5,769,944,986	

2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Kepemilikan Kartu Identitas penduduk	90 %	90 %	1,451,677,000	5,769,944,986	5,769,944,986	2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Kepemilikan Kartu Identitas penduduk	90 %	90 %	5,769,944,986	
2	12	02	2.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	70,565,100	22,782,250	22,782,250	2	12	02	2.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	22,782,250	
2	12	02	2.02	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	48000 Dokumen	48000 Dokumen	125,000,000	43,383,600	43,383,600	2	12	02	2.02	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	48000 Dokumen	48000 Dokumen	43,383,600	
2	12	02	2.05	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KK	65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen	65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen	1,256,111,900	5,703,779,136	5,703,779,136	2	12	02	2.05	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KK	65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen	65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen	5,703,779,136	

2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIIL		Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90 %	90 %	2,425,060,0 00	406,655,20 0	406,655,20 0	2	12	03		PROGRAM PENCATATA N SIPIIL		Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90 %	90 %	406,655,20 0		
2	12	03	2. 01	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	90 %	90 %	2,425,060,0 00	406,655,20 0	406,655,20 0	2	12	03	2.0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	90 %	90 %	406,655,20 0		
2	12	03	2. 01 01	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100050 Dokum en	100050 Dokum en	2,425,060,0 00	406,655,200	406,655,200	2	12	03	2.0 1	01	Pencatatan Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100050 Dok umen	100050 D okumen	406,655,200	
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependuduk an serta terfasilitasi nya pemanfaat an data kependuduk an	100 %	100 %	2,754,927,4 50	8,865,713,9 00	8,865,713,9 00	2	12	04		PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI ADMINISTR ASI KEPENDUD UKAN		Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependuduk an serta terfasilitasi nya pemanfaat an data kependuduk an	100 %	100 %	8,865,713,9 00		
2	12	04	2. 01	Pengumpulan Data Kependuduka n dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependuduka n		Persentase Kerjasama Pemanfaat an data Kependudu kan	100 %	100 %	2,456,889,6 00	8,728,170,8 00	8,728,170,8 00	2	12	04	2.0 1		Pengumpul an Data Kependudu kan dan Pemanfaat an dan Penyajian Database Kependudu kan		Persentase Kerjasama Pemanfaat an data Kependudu kan	100 %	100 %	8,728,170,8 00	
2	12	04	2. 01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Data Kependuduk an yang Diolah dan Disajikan	2 Doku men	2 Doku men	464,034,900	170,011,100	170,011,100	2	12	04	2.0 1	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependuduk an	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Data Kependuduk an yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokume n	170,011,100	

2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	74,999,900	35,073,800	35,073,800	2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	35,073,800	
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1,917,854,800	8,523,085,900	8,523,085,900	2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	8,523,085,900	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase pemanfaatan Data kependudukan Oleh SKPD	90 %	90 %	213,399,800	93,517,400	93,517,400	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase pemanfaatan Data kependudukan Oleh SKPD	90 %	90 %	93,517,400	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	85,499,800	30,244,800	30,244,800	2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	30,244,800	
2	12	04	2.03	07	Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	127,900,000	63,272,600	63,272,600	2	12	04	2.03	07	Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	63,272,600	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		persentase Validitas Data kependudukan	90 %	90 %	84,638,050	44,025,700	44,025,700	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		persentase Validitas Data kependudukan	90 %	90 %	44,025,700	
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	84,638,050	44,025,700	44,025,700	2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	44,025,700	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membiayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai

<i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i>	65
---	----

berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;

<i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i>	66
---	----

- b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
 4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
 5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	67
--	----

Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang professional dan amanah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah **PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur**. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
2. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	69
--	----

Tabel 3. 1
Tujuan dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	B	BB	BB

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut Tahun 2019-2024

Tabel. 3.2
Sasaran dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pelayanan publik yang professional dan amanah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	70
---	----

perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

Kode	RENJA PERUBAHAN 2023			
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
				Renja 2023 Perubahan
1	2	3	4	5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2 1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			27,853,746,937
2 1 0 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	12,811,432,851
2 1 0 2.0 2 1 1	Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penggangan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	90 %	50,580,000
2 1 0 2.0 07 2 1 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,580,000
2 1 0 2.0 2 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan.	90 %	7,501,023,410
2 1 0 2.0 01 2 1 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/b ulan	7,501,023,410

2 1 0 2.0 2 1 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	90 %	373,493,841
2 1 0 2.0 02 2 1 3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	257,903,841
2 1 0 2.0 06 2 1 3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	115,590,000
2 1 0 2.0 2 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan	90 %	680,492,015
2 1 0 2.0 01 2 1 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43,183,800
2 1 0 2.0 02 2 1 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	291,234,200
2 1 0 2.0 05 2 1 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	124,000,300
2 1 0 2.0 06 2 1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9,975,600
2 1 0 2.0 08 2 1 6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	48,420,500
2 1 0 2.0 09 2 1 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	110,054,915
2 1 0 2.0 10 2 1 6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	53,622,700
2 1 0 2.0 2 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan	90 %	3,673,291,000
2 1 0 2.0 02 2 1 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	509,976,000
2 1 0 2.0 05 2 1 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-

2 1 0 2.0 06 2 1 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,163,315,000
2 1 0 2.0 2 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90 %	413,612,585
2 1 0 2.0 01 2 1 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	-
2 1 0 2.0 02 2 1 8	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	206,405,835
2 1 0 2.0 04 2 1 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207,206,750
2 1 0 2.0 2 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan	90 %	118,940,000
2 1 0 2.0 01 2 1 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	19,400,000
2 1 0 2.0 02 2 1 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	53,360,000
2 1 0 2.0 09 2 1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-
2 1 0 2.0 10 2 1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	46,180,000
2 1 0 2 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90 %	5,769,944,986

2 1 0 2.0 2 2 1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan	90 %	5,769,944,986
2 1 0 2.0 ;0 2 2 1 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	22,782,250
2 1 0 2.0 02 2 2 1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	48000 Dokumen	43,383,600
2 1 0 2.0 05 2 2 1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KK Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KTP	65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen	5,703,779,136
2 1 0 2 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90 %	406,655,200
2 1 0 2.0 2 3 1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	90 %	406,655,200
2 1 0 2.0 01 2 3 1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100050 Dokumen	406,655,200
2 1 0 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100 %	8,865,713,900

2 1 0 2.0 2 4 1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	100 %	8,728,170,800
2 1 0 2.0 01 2 4 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	170,011,100
2 1 0 2.0 02 2 4 1	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Laporan	35,073,800
2 1 0 2.0 03 2 4 1	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	8,523,085,900
2 1 0 2.0 2 4 3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan Data kependudukan Oleh SKPD	90 %	93,517,400
2 1 0 2.0 04 2 4 3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	30,244,800
2 1 0 2.0 07 2 4 3	Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	63,272,600
2 1 0 2.0 2 4 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase Validitas Data kependudukan	90 %	44,025,700
2 1 0 2.0 03 2 4 4	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	44,025,700
TOTAL				27,853,746,937

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program sebanyak 4 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pendaftaran Penduduk;
 - c. Program Pencatatan Sipil;
 - d. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
2. jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan;
3. Jumlah sub kegiatan sebanyak 28 subkegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp.27.853.746.937,-,

<i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i>	76
---	----

Tabel 3. 4

Perubahan Rencana Kerja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebut uhan Dana/ Pagu Indika tif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Targ et
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	12				URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG ADMINISTR ASI KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIL										25,318, 571,271	27,853,74 6,937				25,50 0,089, 82 0	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persenta se pemenu han penunja ng urusan Pemerin tah Daerah			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90%	90%				10,115, 412,335	12,811,43 2,851				19,11 5,700, 00 0	
2	12	01	2.0 1		Perencanaa n, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persent ase pemenu han rancang an dokume n perenca naan,			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h					90%	90%	50,580, 000	50,580,00 0				201,0 00,00 0

2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 %	90 %	0	0			Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	66,000,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 %	90 %	50,580,000	50,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	135,000,000
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan			90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 %	90 %	50,580,000	50,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

2	12	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen SKM		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0					135,000,000
2	12	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan.		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h			90%	90%	90%	90%	7,689,152,409	7,501,023,410					7,250,800,000
2	12	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 % 100 %	90 % 100 %	73 Orang/b ula	n73 Orang/b ula	n90 %	90 %	7,689,152,409	7,501,023,410	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persen tase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Terpenuhi	90 % 100 %	7,250,800,000	

2	12	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.		90 % 100 %	90 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	90 % 100 %	0
2	12	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h					90%	90%	0	0					0
2	12	01	2.0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				280,00 0,000
2	12	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h					90%	90%	373,493 ,841	373,493,8 41					280,0 00,00 0

									h									Umum				
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penilaian Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	48 Orang	48 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	350,000,000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h					90%	90%	696,342,500	680,492,015	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.		8,139,900,000
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	1 Paket	1 Paket	90 %	90 %	43,183,800	43,183,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	150,000,000

2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali	90 %	90 %	1 Paket	1 Paket	90 %	90 %	291,234,200	291,234,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	6,500,000,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali	90 %	90 %	2 Paket	2 Paket	90 %	90 %	124,000,300	124,000,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	550,000,000
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	9,975,600	9,975,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	9,900,000

2	12	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	55,916,900	48,420,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	300,000,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	118,409,000	110,054,915	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	500,000,000
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	53,622,700	53,622,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	130,000,000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h							773,291,000	3,673,291,000					1,700,000,000

2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan prasarana Layanan Admninduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali	90 %	90 %	6 Unit	6 Unit	90 %	90 %	509,976,000	509,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	525,000,000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			525,000,000
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel											0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			175,000,000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											773,291,000	3,673,291,000				1,700,000,000

2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan prasarana Layanan Admninduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	85 m2	85 m2	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	175,000,000
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan prasarana Layanan Admninduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	13 Unit	102 Unit	90 %	90 %	263,315,000	3,163,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	1,000,000,000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											413,612,585	413,612,585					820,000,000
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	350,000,000

2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				275,000,000	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										413,612,585	413,612,585					820,000,000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	207,206,750	207,206,750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	195,000,000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				195,000,000	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										118,940,000	118,940,000					274,000,000	

2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	42 Unit	42 Unit	90 %	90 %	19,400,000	19,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	34,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0					0
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											118,940,000	118,940,000					274,000,000

2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	90 %	6 Unit	6 Unit	90 %	90 %	53,360,000	53,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	75,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0					0
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											118,940,000	118,940,000					274,000,000

2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan pelayanan liatadsmi inistrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	1 Unit	1 Unit	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	110,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0					0
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											118,940,000	118,940,000					274,000,000

2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	90 %	1 Unit	1 Unit	90 %	90 %	46,180,000	46,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	55,000,000
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											5,811,558,886	5,769,944,986					1,410,000,000
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk											5,811,558,886	5,769,944,986					960,000,000
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	41,092,250	22,782,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90 %	50,000,000
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk											0	0					0
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					4 Dokumen	4 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000

2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk										0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,000,000
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk										5,811,558,886	5,769,944,986					960,000,000
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	90 %	36000 Dokum	en36000 Dokum	en90 %	90 %	61,442,500	43,383,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90 %	130,000,000
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk										0	0					0
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan										0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				780,000,000
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk										5,811,558,886	5,769,944,986					960,000,000

2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	90 %	90 %	5,709,024,136	5,703,779,136	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90 %	780,000,000
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk											0	0					450,000,000
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Identitas Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 Dokumen	85 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90 %	450,000,000
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk											0	0					0

2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk										0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450,000,000
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL										448,333,300	406,655,200					2,200,000,000
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil										448,333,300	406,655,200					2,200,000,000
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	90 %	100050 Doku	me1n0050 Doku	me3nAkt a	3 Akta	448,333,300	406,655,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90 %	2,200,000,000
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil										0	0					0
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting										0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										0	0					0

2	12	03	2.0 2	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil										0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450,00 0,000
2	12	03	2.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										0	0					0
2	12	03	2.0 2	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	90 %	90 %	3 Laporan	3 Laporan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90 %	0
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										0	0					0
2	12	04	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan										0	0					0

2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan										0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				172,000,000
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan										8,777,065,800	8,728,170,800					2,459,389,820
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	205,204,900	170,011,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100 %	464,035,000
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	38,895,000	35,073,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100 %	77,500,000
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data										0	0					0

2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	persentase Validitas Data kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	65,403,450	44,025,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100 %	90,000,000
TOTAL																25,318,571,271	27,853,746,937				25,500,089,820

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan *stunting* di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	102
---	-----

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	103
--	-----